



## Konstitusionalitas Perbuatan Tidak Menyenangkan Sebagai Tindak Pidana Ujaran Kebencian: Analisis Surat Edaran Kapolri Nomor: Se/6/X/2015

### *The Constitutionality of Unpleasing Act as a Criminal Action of Hate Speech: Analysis of Chief of Police Circular Letter Number: Se / 6 / X / 2015*

Peter Jeremiah Setiawan <sup>1)</sup>, Xavier Nugraha <sup>2)</sup>, Vincentius Sutanto <sup>1)\*</sup> & Marchethy Riwani Diaz <sup>1)\*\*</sup>

1) Fakultas Hukum, Universitas Surabaya, Indonesia

2) Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Indonesia

Diterima: September 2020; Disetujui: Juni 2021; Dipublish: Juni 2021

\*Corresponding Email: [peterjsetiawan@staff.ubaya.ac.id](mailto:peterjsetiawan@staff.ubaya.ac.id), [nugrahaxavier72@gmail.com](mailto:nugrahaxavier72@gmail.com), [vincentius.sutanto-2017@fh.unair.ac.id](mailto:vincentius.sutanto-2017@fh.unair.ac.id)

#### Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis terkait kedudukan perbuatan tidak menyenangkan sebagai salah satu bentuk dari ujaran kebencian (*haatzaai artikelen*) yang notabene konsep perbuatan tidak menyenangkan tersebut telah nyata dihapuskan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013, Masalah difokuskan pada konstitusionalitas perbuatan tidak menyenangkan sebagai salah satu bentuk dari ujaran kebencian (*haatzaai artikelen*). Guna mendekati masalah ini dipergunakan acuan teori dari teori elemen tindak pidana, teori peraturan perundang-undangan, dan teori konstitusionalitas norma. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, sehingga data-data dikumpulkan melalui studi pustaka, baik terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Kajian ini menyimpulkan, bahwa bahwa: (1) Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 yang telah berkekuatan hukum mengikat, maka setiap norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut haruslah menaati ketentuan dengan tidak memunculkan kembali eksistensi dari frasa "perbuatan tidak menyenangkan". (2) Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 bukanlah peraturan perundang-undangan (*regeling*), melainkan peraturan kebijakan (*beleidsregel*) yang mana secara yuridis berdampak pada tidak adanya wewenang untuk membuat norma baru maupun mengembalikan eksistensi dari norma yang telah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga konsep perbuatan tidak menyenangkan dalam Surat Edaran Kapolri yang demikian adalah inkonstitusional.

**Kata Kunci:** Perbuatan Tidak Menyenangkan; Surat Edaran Kapolri; Tindak Pidana Ujaran Kebencian;

#### Abstract

This article aims to analyze the position of unpleasant acts as a form of hate speech (*haatzaai articlesen*), which in fact the concept of unpleasant acts has been eliminated by the Constitutional Court Decision Number 1 / PUU-XI / 2013, The problem is focused on the constitutionality of wrongdoing. fun as a form of hate speech (*haatzaai articlesen*). In order to approach this problem, a theoretical reference from the element theory of crime and the theory of constitutionality of norms is used. This research is a normative legal research, so that the data is collected through literature studies, both on primary, secondary and tertiary legal materials. This research was analyzed qualitatively. This study concludes that: (1) With the Constitutional Court Decision Number 1 / PUU-XI / 2013 which is legally binding, then every legal norm in statutory regulations made after the Constitutional Court Decision must comply with the provisions with does not bring back the existence of the phrase "unpleasant actions". (2) Chief of Police Circular Number: SE / 6 / X / 2015 is not a statutory regulation (*regeling*), but a policy regulation (*beleidsregel*) which juridically results in the lack of authority to create new norms or restore the existence of norms that have been abolished by the Constitutional Court, so the concept of unpleasant acts in such a Chief of Police Circular is unconstitutional.

**Keywords:** Unpleasant acts; Chief of Police Circular Letter; Hate Speech Crime;

**How to Cite:** Setiawan, P.J. Nugraha, X. Sutanto, V. & Diaz, M.R. (2021). Konstitusionalitas Perbuatan Tidak Menyenangkan Sebagai Tindak Pidana Ujaran Kebencian: Analisis Surat Edaran Kapolri Nomor: Se/6/X/2015, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8 (1) 2021 : 74-82

## PENDAHULUAN

Tidak ada satu pun orang di dunia ini yang menginginkan dibenci orang lain. Setiap orang selalu berusaha agar orang tersebut tidak dibenci, baik dari sisi sikap, perkataan, perilaku bahkan kepribadiannya (Christianto, 2018). Meskipun hakikatnya setiap manusia selalu berusaha untuk tidak dibenci oleh manusia lain, namun faktanya, selama tahun 2017, ujaran kebencian menempati urutan perkara tertinggi yang ditangani Kepolisian Republik Indonesia (Polri), yakni sebanyak 3.325 perkara dari 5.061 perkara kejahatan siber (Yulida, 2017). Angka tersebut naik 44,99% dari tahun sebelumnya, yang berjumlah 1.829 kasus. Dilansir berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, benci merupakan salah satu bentuk ekspresi diri yang menolak, tidak menyukai atau menghindari sesuatu (Kemdikbud, 2020). Sedangkan sesuai konsep yuridis *hate speech* merupakan perkataan, perilaku atau perbuatan, tulisan, atau pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku ataupun korban atas tindakan tersebut (Kurniawan, 2015).

Di Indonesia, secara yuridis normatif, pengaturan terkait larangan ujaran kebencian ini telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) (Anam & Hafiz, 2015). Beberapa pasal yang dikenal sebagai pasal-pasal yang mengatur perbuatan pidana ujaran kebencian (*haatzaaï artikelen*), seperti Pasal 154, 155, 156, 157 Kita Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Syaputra et al., 2020). Pasal-pasal tersebut dengan tegas melarang pernyataan yang antara lain berupa pernyataan perasaan kebencian terhadap Pemerintah Indonesia (Pasal 154 dan Pasal 155) atau suatu/beberapa golongan rakyat Indonesia (Pasal 156 dan 157 KUHP) (Mangantibe, 2016).

Pada perkembangannya, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 6/PUU-V/2007 menyatakan beberapa Pasal KUHP yang berkaitan dengan ujaran kebencian inkonstitusional bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945), yakni Pasal 154 dan 155 KUHP. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-V/2007 menyebutkan pokok argumentasi inkonstitusionalitas (pembatalan) Pasal 154 dan 155 KUHP berkaitan dengan

ketidakpastian hukum dan kemerdekaan berpikir serta berpendapat sebagai berikut: (Birawa, 2015):

1. Pasal 154 dan 155 KUHP tidak menjamin adanya kepastian hukum, karena rentannya multitafsir, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.005/PUU-III/2005, yang menyatakan bahwa ketika suatu delik menimbulkan ketidakpastian dalam penerapannya, maka lebih baik perbuatan tersebut tidak dijadikan suatu bentuk delik.
2. Pasal tersebut secara tidak proporsional menghalang-halangi kemerdekaan untuk menyatakan pikiran, sikap, dan kemerdekaan menyampaikan pendapat. Hal ini menyebabkan Pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28 dan 28E Ayat (2) dan Ayat (3) UUD NRI 1945. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 yang menegaskan bahwa pembatasan kebebasan seseorang, haruslah didasarkan atas alasan-alasan yang kuat, masuk akal dan proporsional serta tidak berlebihan. Sehingga, jika dikaitkan dengan pembatasan berekspresi yang ada dalam Pasal 154 dan 155 KUHP adalah suatu bentuk pembatasan yang tidak proporsional dan tidak memiliki alasan yang kuat untuk membatasi kemerdekaan seseorang untuk menyatakan pikiran, sikap, dan pendapat.

Pembatalan Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP tentu tidak menghilangkan keberlakuan pasal-Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP yang berkaitan juga dengan tindak pidana/ delik ujaran kebencian. Selain KUHP, pengaturan terkait juga dapat ditemukan pada UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Atas dasar pemahaman pentingnya kepastian hukum, jaminan kemerdekaan berpikir serta berpendapat juga penghindaran multi penafsiran atas pasal-pasal terkait *haatzaaï artikelen* yang masih berlaku, maka Polri mengeluarkan suatu pedoman berupa Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate*

*Speech*) (Mawarti, 2018). Surat ini menjadi acuan anggota kepolisian dalam melakukan langkah-langkah penanganan dugaan perbuatan ujaran kebencian atau *hate speech* secara proporsional, tepat dan akurat atau tidak sembarangan (Pramesti, 2015). Sekalipun memiliki dasar pemikiran yang sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 pada gilirannya justru memuat ketentuan yang tidak sederhana atau bahkan menunjukkan adanya persoalan-persoalan yang membutuhkan kajian. Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 memperluas konsep dari ujaran kebencian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pasal 2 huruf f Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015, memuat tindakan yang termasuk dalam klasifikasi dari tindak pidana ujaran kebencian yang salah satunya adalah perbuatan tidak menyenangkan (Azis, 2015).

Muatan klasifikasi tersebut di atas menjadi persoalan utama yang dapat diidentifikasi pada Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015. Klasifikasi pada Surat Edaran tersebut tetap mencantumkan perbuatan tidak menyenangkan, padahal berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013, frasa “perbuatan tidak menyenangkan” yang diatur dalam Pasal 335 KUHP telah diputuskan sebagai frasa yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi karena sifat unsumnya yang sangat subyektif dan diskriminatif. Hal ini membuat, norma hukum atas delik perbuatan tidak menyenangkan menjadi sangat luas maknanya seperti karet, yang ditakutkan dapat ditarik kemana-mana. Oleh karena itu, frasa pada pasal tersebut menjadi inkonstitusional dan bertentangan dengan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

Dengan dihapusnya unsur “perbuatan tidak menyenangkan”, sejatinya tidak serta merta menghilangkan Pasal 335 KUHP tersebut. Memang, delik yang diatur di dalam Pasal 335 KUHP ini sering disebut sebagai delik perbuatan tidak menyenangkan, namun sejatinya unsur “perbuatan tidak menyenangkan” hanyalah salah satu unsur alternatif yang notabene terdapat unsur lain, yaitu: a) dengan memakai kekerasan; atau b) dengan memakai ancaman kekerasan maka

dapat dikatakan Tindakan tersebut telah *voltooid* (telah mencukupi rumusan delik) pada Pasal 335 KUHP ini (Sari et al., 2019).

Contoh dari masih digunakannya Pasal 335 KUHP ini, misal dapat dilihat dalam Putusan Nomor 122/Pid.B/2017/PN Llg. Dalam perkara tersebut terdakwa divonis melakukan Pasal 335 KUHP, karena memenuhi unsur: 1) barang siapa; dan 2) Unsur Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Hal ini menunjukkan, bahwa pada ketentuan setingkat undang-undang unsur “perbuatan tidak menyenangkan” tersebut benar-benar hilang, meskipun Pasal 335 KUHP masih tetap berlaku.

Dihapusnya unsur “perbuatan tidak menyenangkan” di dalam peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang yang notabene “dihidupkan” Kembali melalui Surat Edaran Kapolri yang telah diuraikan di atas yang hendak dikaji pada penulisan artikel ini.

## METODE PENELITIAN

Metode penulisan adalah penelitian yuridis normatif. Penulis menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer yang terdiri dari UUD 1945, KUHP, UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku, artikel dan bahan hukum tersier berupa KBBI, *Black's Law Dictionary*.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yakni pengolahan data yang diperoleh melalui studi pustaka, literatur, analisis Putusan MK sehingga diperoleh informasi yang akurat kemudian dapat digambarkan dalam kata-kata atau kalimat sehingga dapat ditarik kesimpulan dari umum ke khusus (Nugraha & Katherina, 2019).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perbuatan Tidak Menyenangkan Sebagai Bentuk Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

Sebelum memahami kedudukan “perbuatan tidak menyenangkan” sebagai salah satu bentuk tindak pidana ujaran kebencian di dalam peraturan perundang-undangan, maka patut dipahami terlebih dahulu makna perbuatan tidak menyenangkan menurut para ahli. Adapun makna perbuatan tidak menyenangkan adalah:

1. Lilis Hartini, Aceng Ruhendi Saifullah, dan Dadang Sudana. Perbuatan tidak menyenangkan adalah suatu tindakan yang menyebabkan orang lain merasa tidak nyaman, tidak senang, terganggu, marah, dan sebagainya (Hartini et al., 2020).
2. Irvan Saputra. Perbuatan tidak menyenangkan adalah Suatu perlakuan yang menyinggung perasaan orang lain (Saputra, 2019).
3. H.A.K. Moch.Anwar. Perbuatan yang tidak menyenangkan adalah setiap perlakuan yang menyinggung perasaan orang, hingga perbuatan yang tidak menyenangkan itu bersifat subyektif (Kossah, 2012).

Dari uraian para ahli di atas terkait makna “perbuatan tidak menyenangkan” tersebut, maka dapat dipahami bahwa “perbuatan tidak menyenangkan” adalah sesuatu yang sangat subyektif.

Pada tahun 2015 Kepala Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) guna membekali diri Polri dalam melakukan tindakan preventif dan represif terkait maraknya tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) di Indonesia. Dalam Pasal 2 huruf f Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015, menuliskan 7 bentuk dari tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) meliputi: 1) Penghinaan; 2) Pencemaran nama baik; 3) Penistaan; 4) Perbuatan tidak menyenangkan; 5) Memprovokasi; 6) Menghasut; 7) Penyebaran berita bohong

Adanya 7 (tujuh) bentuk perbuatan tersebut tidak kemudian serta merta diklasifikasi sebagai tindak pidana ujaran kebencian atau orang yang melakukan bentuk-bentuk perbuatan tersebut serta merta menjadi pelaku tindak pidana ujaran kebencian. Hanya dengan kualifikasi ketika tujuh perbuatan

tersebut dilakukan dengan tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial, maka baru dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ujaran kebencian. Mengenai hal ini diatur dalam Pasal 2 huruf g Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015, yang menjelaskan bahwa:

ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas, bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek: suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel (cacat) dan orientasi seksual.

Dengan demikian, dapat ditafsirkan bahwa ketika tujuh tindakan yang diatur dalam Pasal 2 huruf f Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat sesuai yang diatur dalam Pasal 2 huruf g Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015, barulah tindakan tersebut dikatakan sebagai tindakan yang masuk dalam ujaran kebencian (Azis, 2015).

Pasal 2 huruf f Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tersebut sebenarnya bukanlah ekstensifikasi atau perluasan dari delik ujaran kebencian dan memang tidak seharusnya untuk itu. Pasal 2 huruf f tersebut, menjadi upaya Kapolri untuk menerangkan jenis perbuatan apa saja yang dapat tergolong perbuatan ujaran kebencian. Ketujuh bentuk perbuatan tersebut merupakan perincian dan penggolongan perbuatan-perbuatan yang sejatinya telah diatur peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu Pasal 156 KUHP, Pasal 157 KUHP, Pasal 310 KUHP, Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Secara normatif delik-delik tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut; Penghinaan dan penistaan adalah delik inti (*bestanddeel delict*) dari Pasal 156 KUHP; Pencemaran nama baik adalah delik inti (*bestanddeel delict*) dari Pasal 310 KUHP; Menghasut dan memprovokasi dengan cara memperlihatkan

dan menunjukkan kebencian di depan umum adalah delik inti (*bestanddeel delict*) dari Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis; dan Penyebaran berita bohong adalah delik inti (*bestanddeel delict*) dari Pasal 28 jo. Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berikut di bawah ini adalah penjabaran dari pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur perihal larangan melakukan ujaran kebencian (*hate speech*):

1. Pasal 156 KUHP: "Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara."
2. Pasal 157 KUHP: "Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempel tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."
3. Pasal 310 KUHP: "Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."
4. Pasal 28 jo. Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menyebarkan kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)."
5. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis: "Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)."

Dari tujuh klasifikasi tersebut, ternyata terdapat satu jenis perbuatan yang tidak memiliki delik inti (*bestanddeel delict*) dalam pengaturan hukum pidana di Indonesia. Perbuatan tersebut adalah terkait perbuatan tidak menyenangkan. Tidak adanya pengaturan terkait perbuatan tidak menyenangkan di peraturan perundang-undangan di Indonesia, disebabkan karena telah dihapusnya frasa "perbuatan tidak menyenangkan" tersebut dalam Pasal 335 KUHP oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013.

Kehadiran Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) tersebut kemudian menimbulkan problematika penegakan hukum karena dimunculkannya kembali frasa "perbuatan tidak menyenangkan" sebagai salah bentuk dari ujaran kebencian (*hate speech*) (Meilikhah, 2015). Ketakutan yang timbul dalam masyarakat adalah ketika Surat Edaran Kapolri tersebut nantinya dapat membatasi kebebasan berpendapat dan dapat kembali dijadikan alat untuk memviktimisasi rakyat yang memberi kritik terhadap pemerintah pasca telah dihapuskannya frasa "perbuatan tidak menyenangkan" dalam Pasal 335 KUHP. Maka dalam hal ini muncullah pertanyaan mengenai "perbuatan tidak menyenangkan" seperti apa yang dimaksudkan dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tersebut dan apakah "perbuatan tidak menyenangkan"

sebagai salah satu bentuk dari ujaran kebencian (*Hate Speech*) tersebut adalah “perbuatan tidak menyenangkan” yang sama dengan frasa yang telah dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi?

Dalam rangka Merumuskan jawaban dari pertanyaan di atas, perlu dipahami terlebih dahulu konsep “perbuatan tidak menyenangkan”, baik yang ada dalam KUHP sebelum lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 maupun yang ada dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015. Pasal 335 KUHP sebelum lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.”

Apabila mengkaji rumusan unsur demi unsur dari pasal tersebut, dapat dipahami bahwa kedudukan “perbuatan tidak menyenangkan” sejajar atau setara dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan. Sehingga sejatinya inti delik atau *bestanddeel delict* dari pasal tersebut bukanlah terletak pada frasa “perlakuan yang tak menyenangkan”, tetapi pada frasa “memaksa orang lain” (Swadana, 2014). Dengan perkataan lain, perbuatan pemaksaan tersebut tidak harus disertai oleh adanya kekerasan atau ancaman kekerasan, akan tetapi dapat pula disertai oleh perbuatan lain yang tidak menyenangkan. Namun KUHP sendiri tidak memberikan acuan dan batasan sejauh mana suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan tidak menyenangkan. Hal ini menyebabkan perbuatan tidak menyenangkan tersebut dapat ditafsirkan sangat subjektif

Contoh dari subyektifitas akan frasa “perbuatan tidak menyenangkan” yang diatur dalam Pasal 335 KUHP adalah kasus seorang Ketua RW di Jalan Gajah Makassar yang terjerat Pasal 335 KUHP atas dasar perbuatan tidak menyenangkan hanya karena beliau menegur tetangga depan rumahnya yang melakukan pembangunan rumah dan menutupi 1 (satu) meter jalan menuju rumahnya dengan mengatakan akan menghalangi pembangunan

rumah tetangganya tersebut. Karena tidak adanya batasan itulah Mahkamah Konstitusi dalam pendapatnya di poin 3.15 menyatakan bahwa “perbuatan tidak menyenangkan” tersebut bersifat sangat subjektif atau dengan kata lain perbuatan apapun dapat dikatakan sebagai perbuatan tak menyenangkan apabila korban, penyidik, ataupun penuntut umum merasa demikian. Atas dasar itulah pasal tersebut dianggap sebagai pasal karet yang justru dapat merampas kebebasan dan hak asasi manusia setiap warga negara, sehingga Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa frasa “perbuatan tidak menyenangkan” dalam pasal tersebut adalah inkonstitusional dan haruslah dihapuskan. Sehingga bunyi dari Pasal 335 KUHP tersebut seyogyanya menjadi: “Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” (Manthovani, 2014).

Beralih pada konsep “perbuatan tidak menyenangkan” sebagai salah satu bentuk ujaran kebencian (*hate speech*) dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015, dalam Surat Edaran tersebut sama sekali tidak menjelaskan mengenai konsep perbuatan tidak menyenangkan yang dimaksud. Selain itu, Dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 juga tidak memasukkan Pasal 335 KUHP dalam pedoman penanganan kasus ujaran kebencian (*hate speech*) bagi Polri itu sendiri. Berbeda dengan Pasal-pasal lain yang dimaksudkan sebagai pedoman dalam Surat Edaran tersebut, seperti Pasal 156, 157, 310, 311 KUHP, Pasal 28 jo. 45 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Pasal 16 UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Tanpa adanya rujukan pasal ataupun penjelasan, maka konsep perbuatan tidak menyenangkan yang diatur dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 bisa dianggap sama dengan konsep “perbuatan tidak menyenangkan” yang pernah diatur dalam Pasal 335 KUHP. Sehingga, dapat dikatakan, bahwa jika enam perbuatan lain dalam Pasal 2 huruf f Surat Edaran Kapolri tersebut adalah klasifikasi delik inti dari pasal-pasal peraturan

perundang-undangan yang telah ada, maka munculnya kembali frasa “perbuatan tidak menyenangkan” tersebut adalah ekstensifikasi (perluasan) yang telah dilakukan oleh Kapolri.

Bentuk ekstensifikasi tersebut adalah terkait konsep bahwa perbuatan “tidak menyenangkan” yang diatur dalam Pasal 2 huruf f Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015, hanya bisa dianggap sebagai delik perbuatan ujaran kebencian ketika memiliki tujuan dan/atau dapat berdampak pada timbulnya diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial sesuai yang diatur dalam Pasal 2 huruf g Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015.

### **Konstitusionalitas Perbuatan Tidak Menyenangkan Sebagai Bentuk Tindak Pidana Ujaran Kebenciaan (*Hate Speech*)**

Pada Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015, konstruksi dari perbuatan tidak menyenangkan yang diklasifikasikan sebagai ujaran kebencian adalah ketika perbuatan tidak menyenangkan tersebut memiliki tujuan dan/atau dapat berdampak pada timbulnya diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik social sesuai yang diatur dalam Pasal 2 huruf g Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015.

Dari konstruksi tersebut, dapat dilihat bahwa seolah-olah terdapat norma baru yang berbeda dengan norma “perbuatan tidak menyenangkan” yang pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini tentu menimbulkan problematika terkait konstitusionalitas dari norma baru tersebut.

Sebelum, membahas konstitusionalitas dari perbuatan tidak menyenangkan sebagai bentuk ujaran kebencian, maka penting untuk ditinjau terlebih dahulu tentang adanya pembentukan norma baru oleh Kapolri.

Pada segi kewenangan Polri untuk menerbitkan norma, maka surat edaran dapat dilihat sebagai produk hukum yang dikeluarkan oleh Polri. Pada tataran konsep pembentukan norma hukum, surat edaran bukanlah peraturan perundang-undangan (*regeling*), bukan pula keputusan tata usaha negara (*beschikking*) (Sucipta, 2014), melainkan sebuah peraturan kebijakan (*beleidsregel*).

Pemahaman dasar tersebut mendudukan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 sebagai peraturan kebijakan

(*beleidsregel*) atau peraturan perundang-undangan semu (*pseudo wetgeving*) (Suratno, 2017). Surat edaran ini hanya sebatas instrumen administratif yang bersifat internal. Surat Edaran ditujukan untuk memberikan petunjuk lebih rinci mengenai suatu norma peraturan perundang-undangan yang bersifat umum (Arafat, 2017). Pembentukan norma petunjuk tentu harus dibedakan dengan pembentukan norma baru.

Demikian halnya dengan Surat Edaran yang notabene seyogyanya tidak boleh memuat norma baru. Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015, yang notabene sesuai kaidah tersebut hanya memberikan petunjuk penjelasan atau perincian ujaran kebencian yang dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP. Hal ini Secara eksplisit nampak pada ketentuan Pasal 2 huruf a Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 yang menyatakan bahwa “ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP...”.

Surat Edaran Kapolri tersebut hanya menunjuk pada tindak-tindak pidana yang sudah ada, baik yang ada dalam KUHP maupun tindak pidana di luar KUHP seperti tindak pidana yang ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Surat edaran ini tidak membuat kaidah-kaidah atau norma-norma baru dalam bidang hukum pidana.

Di samping itu, bentuk produk hukum suatu Surat Edaran Kapolri, dapat dibedakan tegas dengan Peraturan Kapolri. Dilihat dari sudut ini, Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 adalah sebagai suatu instruksi internal dalam lingkungan kepolisian yang berada pada tingkat operasional kepolisian untuk penanganan praktis perbuatan-perbuatan yang dipandang sebagai ujaran kebencian sepanjang perbuatan itu memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial.

Surat Edaran ini sejatinya hanya menjadi petunjuk teknis penerapan suatu norma dalam pasal tertentu, bukan untuk menciptakan norma baru. Dengan demikian, maka dalam proses-proses pembentukannya Surat Edara tetap tidak boleh bertentangan dan harus

merujuk atau memperhatikan norma-norma yang ada.

Terkait hal ini norma dasar dari “perbuatan yang tidak menyenangkan” dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 adalah norma “perbuatan tidak menyenangkan” yang diatur dalam Pasal 335 KUHP. Sekalipun dalam hal ini Kapolri telah menambahkan syarat dan batasan dari perbuatan tidak menyenangkan dengan harapan lebih menjamin objektivitas dari frasa tersebut, akan tetapi penambahan syarat dan batasan tersebut tidak dapat mengubah subjektivitas frasa “perbuatan tidak menyenangkan” maupun mengembalikan eksistensi dari frasa tersebut pasca dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi.

Apabila dikaji secara normatif, dapat diketahui bahwa bentuk ujaran kebencian (*hate speech*) adalah delik aduan yang menitikberatkan tidak hanya pada perbuatan yang dilakukan (Royani, 2018), akan tetapi juga pada akibat yang ditimbulkan berupa adanya kerugian fisik maupun psikis yang dialami korban (tindak pidana materil) (Purwoleksono, 2013). Oleh karena itu, tanpa memberikan syarat dan batasan terkait timbulnya diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, atau konflik sosial pun sudah dapat dipastikan bahwa setiap ujaran kebencian (*hate speech*) tersebut nantinya pasti mengarah pada akan timbulnya akibat-akibat tersebut di atas. Sedangkan permasalahan frasa “perbuatan tidak menyenangkan” tersebut sejak awal ada pada ketidakjelasan “perbuatan” apa saja yang dapat dikatakan sebagai “perbuatan tidak menyenangkan”, bukan pada “akibat” apa saja yang dapat ditimbulkan mengingat tindak pidana materil pasti menitikberatkan pada adanya akibat itu sendiri. Sekalipun terbukti adanya syarat bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai “perbuatan yang tidak menyenangkan” karena mengarah pada adanya diskriminasi atau kekerasan, tetap saja penegak hukum tidak dapat merumuskan pasal mana yang dapat dijadikan dasar untuk dikenakan pada perbuatan tersebut. Karena kembali lagi, frasa “perbuatan tidak menyenangkan” tersebut adalah suatu bentuk kekaburan norma (*vague normen*) (Indradewi, 2020) dan hal itulah yang menjadi alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menghapuskan frasa tersebut.

Penambahan syarat dalam konsep “perbuatan tidak menyenangkan” dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015, tidak mengilangkan adanya kesamaan sebagaimana dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, perbuatan tidak menyenangkan yang merupakan klasifikasi dari perbuatan ujaran kebencian tersebut tetap inkonstitusional, karena norma “perbuatan tidak menyenangkan” sebagai norma dasar telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013.

## SIMPULAN

Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013, frasa “perbuatan tidak menyenangkan” yang terkandung dalam Pasal 335 KUHP telah dihapuskan, sehingga setiap norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi haruslah tidak memunculkan kembali eksistensi dari frasa “perbuatan tidak menyenangkan” termasuk pada Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 yang notabene tidak memiliki wewenang untuk membuat norma baru maupun mengembalikan eksistensi dari norma yang telah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan dasar tersebut, “perbuatan tidak menyenangkan” sebagai salah satu bentuk ujaran kebencian (*hate speech*) dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tersebut adalah inkonstitusional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anam, M. C., & Hafiz, M. (2015). Surat Edaran Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia. *Jurnal Keamanan Nasional*, 1(3), 341–364.
- Arafat. (2017). Eksekusi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 Pasca Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014. *Tanjungpura Law Journal*, 1(2), 114–134.
- Azis, A. (2015). Tindak Pidana Penyebaran Informasi Yang Menimbulkan Rasa Kebencian Atau Permusuhan Melalui Internet Di Indonesia (Kajian Terhadap Pasal 28 Ayat (2) UU No. 11 Th 2008 Juncto Pasal 45 Ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik). *Pakuan Law Review*, 2(2), 325–258.
- Birawa, P. A. C. (2015). Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-V/2007 Terhadap Keberlakuan Pasal 154 Dan Pasal



- 155 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Novum: Jurnal Hukum*, 2(2), 163–167.
- Christianto, H. (2018). *Perbuatan Pidana Ujaran Kebencian: Ragam dan Studi Kasus*. Graha Ilmu.
- Hartini, L., Saifullah, A. R., & Sudana, D. (2020). Linguistik Forensik terhadap Perbuatan Tidak Menyenangkan di Media Sosial (Kajian Pragmatik). *Deiksis*, 12(03), 259. <https://doi.org/10.30998/deiksis.v12i03.5416>
- Indradewi, A. A. S. N. (2020). Substansi Hukum Kekaburan Norma Pada Peralihan Hak Cipta. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(3), 22–28.
- Kemdikbud. (2020). No Title. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/benci>
- Kossah, F. F. M. (2012). Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemaksaan Sesuai Dengan Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Hukum*, 2(1), 97.
- Kurniawan, R. (2015). Fenomena Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Sosial Media: Analisis Kasus Munculnya Meme Kekalahan Prabowo dan Kemenangan Jokowi pada Pilpres 2014. *Jurnal Hukum Padjajaran*, 5(3), 81–98.
- Mangantibe, V. (2016). Ujaran Kebencian Dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 Tentang Penanganan Ucapan Kebencian (Hate Speech). *Lex Crimen*, 5(1), 159–162.
- Mawarti, S. (2018). Fenomena Hate Speech Dampak Ujaran Kebencian. *Toleransi: Media Ilmiah Komunikasi Beragama*, 10(1), 83–95.
- Meilikhah, K. (2015). *Frasa “Perbuatan Tidak Menyenangkan” Sudah Dihapus MK Tapi Ada di SE Ujaran Kebencian*. Wwww.Medcom.Id. <https://www.medcom.id/nasional/hukum/4KZ74erN-frasa-perbuatan-tidak-menyenangkan-sudah-dihapus-mk-tapi-ada-di-se-ujaran-kebencia>
- Nugraha, X., & Katherina, A. M. F. (2019). Tanggung Jawab Promotor Perseroan Terbatas Terhadap Kontrak Pra Inkorporasi Di Indonesia. *Media Iuris*, 2(127–155).
- Purwoleksono, D. (2013). *Hukum Pidana*. Airlangga University Press.
- Royani, Y. M. (2018). Kajian Hukum Islam Terhadap Ujaran Kebencian/Hate Speech Dan Batasan Kebebasan Berekspresi. *Jurnal IQTISAD*, 5(2), 1–27.
- Saputra, I. (2019). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Ujaran Kebencian (Hate Speech) Kepada Kepala Negara Dan Kapolri (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 3006/ PID.SUS/2017/PN MEDAN)*. Universitas Sumatera Utara.
- Sari, I. D. M., Gita, H., & Lumbanraja, A. D. (2019). Analisis Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Delik Perbuatan Tidak Menyenangkan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(2), 171–181. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i2.171-181>
- Sucipta, P. R. (2014). Kekuatan Hukum Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menerbitkan Keputusan (Beschikking) Dihubungkan Dengan Penerapan Asas Praesumptio Iustae Causa”. *Jurnal Selat*, 2(1), 201–211.
- Suratno, S. B. (2017). Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. *Lentera Hukum*, 4(3), 164–174.
- Swadana, D. I. (2014). Implikasi Yuridis dari Perubahan Pasal 335 Ayat (1) Butir ke-1 tentang Perbuatan tidak Menyenangkan. *Kemendikbud*, 3(2), 23–76.
- Syaputra, I. wayan D., Arjaya, I. M., & Sudibya, D. G. (2020). Sanksi Pidana bagi Pelaku Penyebaran Berita Hoaks serta Ujaran Kebencian dengan Memakai Akun Anonym. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(1), 178–183.
- Yulida, M. (2017). *Selama 2017 Polri Tangani 3.325 Kasus Ujaran Kebencian*. News.Detik.Com. <https://news.detik.com/berita/d-3790973/selama-2017-polri-tangani-3325-kasus-ujaran-kebencian>.

ISSN 2355-987X (Print)

# Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum



Penegakan Hukum	Volume	Number	Halaman	Medan	ISSN 2355-987X (Print) (Online)
--------------------	--------	--------	---------	-------	------------------------------------

Fakultas Hukum - Universitas Medan Area  
Indonesia

## Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum

ISSN 2355-987X (Print) | ISSN 2622-061X (Online)

Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum is a Journal of Law for information and communication resources for academics, and observers of Business Law, International law, Criminal law, and Civil law. The published paper is the result of research, reflection, and criticism with respect to the themes of Business Law, International law, Criminal law, and Civil law. All papers are peer-reviewed by at least two referees

- Sinta 3
- Google Scholar
- Indonesia onesearch
- Garuda
- Dimensions



USER

Username

Password

☐ Remember me

Login

Visits

19 260



# Editorial Team

## Chief in Editor

M. Yusrizal Adi Syaputra, Universitas Medan Area, Indonesia

## Editor

Fitri Yanni Dewi Siregar, Universitas Medan Area, Indonesia

Anggreni Atmei Lubis, Universitas Medan Area, Indonesia

Nur Jannah, Universitas Medan Area, Indonesia

Alvin Hamzah Nasution, Universitas Medan Area, Indonesia

Ria Vurnika Ginting, Universitas Medan Area, Indonesia

Andryan Andryan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,, Indonesia

Muldri Pudamo James Pasaribu, Universitas Simalungun, Indonesia


Budi Bahreisy, Universitas Malikussaleh, Indonesia

Dessy Agustina Harahap, Universitas Medan Area, Indonesia

Beby Suryani Fitri, Universitas Medan Area, Indonesia

## Table of Contents

### Articles

<b>Kebijakan Hukum Pidana Penanganan dan Pengelolaan Sampah Kampanye Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia</b> <a href="#">doi &gt;</a> 10.31289/jiph.v8i1.4508  <i>Aras Firdaus, Qory Rizqiah H Kalingga</i>	PDF 1-7
<b>Hak Imunitas Anggota DPR RI Sebagai Pejabat Publik dalam Hal Menjalankan Tugas dan Wewenangnya</b> <a href="#">doi &gt;</a> 10.31289/jiph.v8i1.5123  <i>Faisal Akbar Nasution</i>	PDF 8-17
<b>Penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 Tentang Pemeriksaan Terkait Pengajuan Restitusi Pajak (Studi : CV. AA)</b> <a href="#">doi &gt;</a> 10.31289/jiph.v8i1.4564  <i>Ivan Jovi Hutauruk, Budiman Ginting, Sunarmi Sunarmi, Jelly Leviza</i>	PDF 18-26
<b>Analisis Hukum Penggunaan Tenaga Kerja Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Medan</b> <a href="#">doi &gt;</a> 10.31289/jiph.v8i1.4162  <i>Fani Budi Kartika, Erni Darmayanti</i>	PDF 27-34
<b>Kedudukan Hukum Akta Notaris dihadapan para Penghadap berkaitan dengan Hak Nasabah Perbankan</b> <a href="#">doi &gt;</a> 10.31289/jiph.v8i1.4620  <i>Lia Azrina</i>	PDF 35-48
<b>Tinjauan Yuridis terhadap Kedudukan Fintech Yang Tidak Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan</b> <a href="#">doi &gt;</a> 10.31289/jiph.v8i1.5125  <i>Muldiri Pudamo James Pasaribu</i>	PDF 49-58
<b>Kehidupan Sehari-Hari</b> <a href="#">doi &gt;</a> 10.31289/jiph.v8i1.4746  <i>Azmiaty Zuliah, Adi Putra, Dian Hardian Silalahi</i>	59-66
<b>Analisis Yuridis terhadap Korban Penyebaran Berita Bohong (Hoax) di Media Sosial</b> <a href="#">doi &gt;</a> 10.31289/jiph.v8i1.4214  <i>Ridho Mubarak, Wessy Trisna</i>	PDF 67-73
<b>Konstitusionalitas Perbuatan Tidak Menyenangkan Sebagai Tindak Pidana Ujaran Kebencian: Analisis Surat Edaran Kapolri Nomor: Se/6/X/2015</b> <a href="#">doi &gt;</a> 10.31289/jiph.v8i1.4277  <i>Peter Jeremiah Setiawan, Xavier Nugraha, Vincentius Sutanto, Marchethy Riwani Diaz</i>	PDF 74-82
<b>Pemberian Bimbingan Pribadi Sosial terhadap Narapidana Lanjut Usia sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Hidup</b> <a href="#">doi &gt;</a> 10.31289/jiph.v8i1.4297  <i>Rama Fatahillah Yulianto</i>	PDF 83-90

**Analisis Yuridis Terhadap Upaya Hukum Pembelaan Advokat Terhadap Tersangka Korupsi Yang Menghalang-Halangi Penyidikan KPK (Studi Putusan No. 09/Pidsus-TPK/2018)**

PDF  
91-100


 10.31289/jiph.v8i1.4878

 *Taufiq Nugraha Syahputra, Edi Warman, Edi Yunara, M Hamdan*

**Pengaruh Partai Politik Bagi Pendidikan Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Walikota Kota Medan Tahun 2020**

PDF  
101-112

 10.31289/jiph.v8i1.4744

 *Benito Asdhie Kodiyat MS, Andryan Andryan*